

Judul : Surpres RUU TPKS Dibacakan pada Penutupan Masa Sidang
Tanggal : Kamis, 17 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Surpres RUU TPKS Dibacakan pada Penutupan Masa Sidang

PEMERINTAH telah selesai menyusun daftar inventaris masalah (DIM) dan Surat Presiden (Surpres) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). DPR RI pun sudah menerima DIM dan surpres tersebut.

Hal itu diakui Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya, kemarin.

"Iya, sudah. Surat tersebut akan disampaikan pada rapat paripurna penutupan masa sidang III 2021-2022," kata Muhaimin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, setelah surat dibacakan,

DPR bakal menentukan alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Hal itu akan dilakukan dalam waktu cepat. "Pokoknya ini akan ekstra perhatian cepat," tambah Muhaimin.

Ia juga menyampaikan terbuka kemungkinan pembahasan RUU TPKS dilakukan saat masa reses. Menurutnya, pembahasan bakal regulasi bisa dilakukan jika dianggap mendesak. "Bisa (dibahas saat reses). Seperti biasanya, bisa," ujarnya.

Willy mengatakan surpres pembahasan RUU TPKS bernomor R.05/Pres/02/2022 itu didatangkan pada 11 Februari 2022. Surpres berkaitan dengan penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU TPKS.

Namun, tidak disebutkan secara terperinci kementerian/ lembaga yang ditugasi membahas bakal beleid tersebut.

Di sisi lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly menjelaskan pembahasan RUU TPKS bisa berlangsung dengan cepat. Bahkan pihaknya menyatakan siap membahasnya dengan DPR di tengah masa reses.

"Lebih cepat lebih baik. Kan, banyak masalah soal (kekerasan) seksual itu," Menkum dan HAM menandaskan.

Dalam lampiran tanda terima pengiriman dokumen yang disampaikan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia kepada Ketua DPR Puan Maharani, jelasnya, ter-

dapat Surpres RI Nomor R.05/Pres/02/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU TPKS dan DIM.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini, menyoroti lonjakan angka kekerasan seksual terhadap anak. Dalam data yang dianalisisnya, yakni laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada 2021, dari sebanyak 14.517 kekerasan terhadap anak yang diterima KPPA, 45,1%-nya ialah kekerasan seksual.

Angka tersebut, menurut Amel, sangat miris dan akan berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak secara keseluruhan.

Politikus asal Bengkulu tersebut meyakini RUU TPKS yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR mampu meredam kronisnya angka kekerasan seksual terhadap anak-anak. (Uta/MGN/X-7)